



ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 DAN RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

Disampaikan oleh:

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Staf Ahli Menteri Bid. Pemerintahan
Kementerian Dalam Negeri
Samarinda , 22 April 2021





Curriculum Vitae

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 mei 1964
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV e

Riwayat Pendidikan:

- ❖ APDN Riau 1987
- ❖ S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990
- ❖ S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
- ❖ S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Riwayat Jabatan:

- ☐ STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN
- ☐ PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
- ☐ PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU (Februari 2021)
- ☐ PLT. SESTAMA BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2019 - 2020)
- ☐ PJ. GUBERNUR BENGKULU (2015 - 2016)
- ☐ REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2013 - 2015)
- ☐ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2010 - 2013)
- ☐ KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008 - 2010)
- ☐ KEPALA BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2007 - 2008)
- ☐ KEPALA BAPPEDA KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2004 - 2007)
- ☐ KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2000 - 2004)
- ☐ CAMAT KARIMUN KAB. KEPRI PROV. RIAU (1999 - 2000)





GAMBARAN UMUM INDONESIA

1,905
Juta Km²

17.000
Pulau

34
Provinsi

416
Kabupaten

98
Kota

7.230
Kecamatan

74.953
Desa

8.488
Kelurahan



Luas mencapai 1.905 juta km², Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama.



Memiliki 3 Zona Waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).



Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia. Jumlah Penduduk Negara Indonesia adalah 268.583.016 Penduduk



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020-2024



RPJMN telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020



RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju



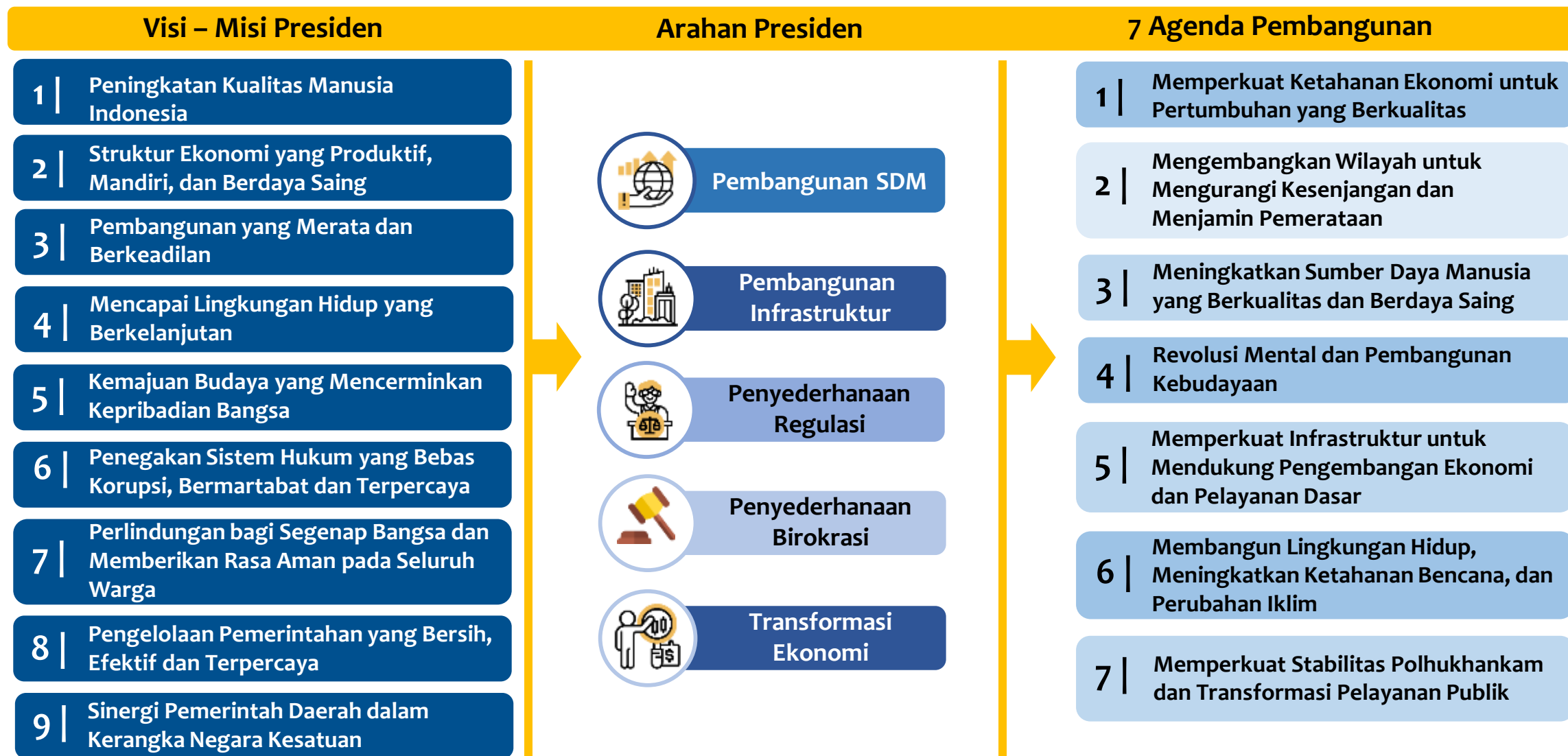
RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan



RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (tahunan)



5. VISI-MISI DAN ARAHAN PRESIDEN SERTA AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024





TARGET PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024



**PERTUMBUHAN
EKONOMI**

5,4-6,0
(persen)



**TINGKAT
KEMISKINAN**

6,5-7,0
(persen)



GINI RASIO

0,370-0,374
(indeks)



**TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA**

4,0-4,6
(persen)



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

75,54
(nilai)

SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2022



**Pertumbuhan
Ekonomi**
5,4-6,0



**Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)**
5,5-6,2



**Rasio Gini
(nilai)**
0,376-0,378



**Indeks Pembangunan
Manusia (nilai)**
73,44-73,48



**Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (%)**
2,6-27,1



**Nilai Tukar
Petani/NTF (nilai)**
102-104



**Nilai Tukar
Nelayan/NTN (nilai)**
102-105



**Tingkat
Kemiskinan (%)**
8,5-9,0

Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2022 berupa rancangan awal



PEDOMAN YANG DIGUNAKAN Untuk Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

➔ **1** Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

➔ **2** Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

➔ **3** Terjadi perubahan yang mendasar

➔ Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

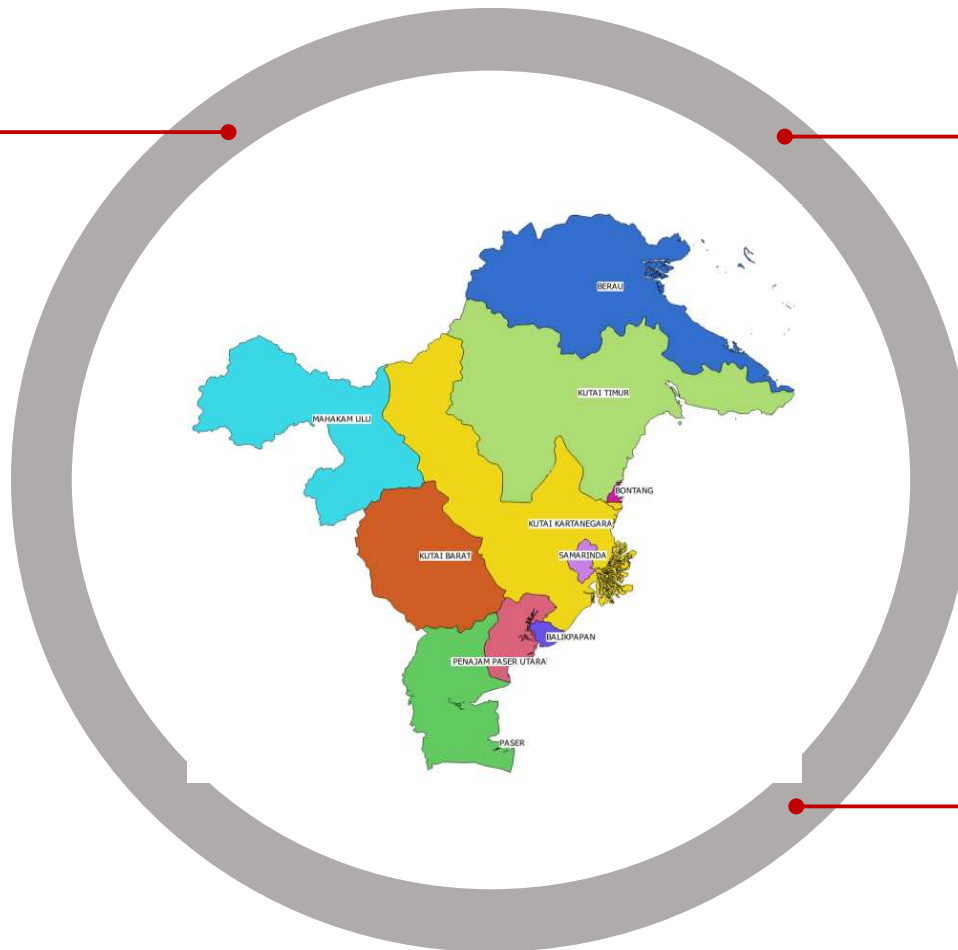
Hasil Telaah

Berdasarkan hasil telaah Kementerian Dalam Negeri, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Latar Belakang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan Nasional, berupa terbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024, yang di dalamnya memuat rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)



Memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD utamanya pada capaian target indikator kinerja



Kondisi Lingkungan Strategis Khususnya Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah



HASIL KONSULTASI RANWAL Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

01

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan dari kementerian masing-masing urusan tentang penetapan indikator. Hal ini bertujuan untuk memperbarui indikator, satuan dan cara perhitungan

02

Perlu menarasikan dan mensinkronkan data berupa capaian pembangunan seperti matriks, tabel atau grafik yang disajikan sebagai penjelasan atas matriks, tabel atau grafik tersebut

03

Perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam menentukan proyeksi anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi terakhir yang mempengaruhi keuangan daerah, contoh kemungkinan perubahan struktur belanja daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

04

Dalam melakukan perumusan masalah, harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek pembangunan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta geografi dan demografi.

05

Perlu penambahan kesimpulan hasil pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja sampai Tahun 2020 pada subbab permasalahan.

06

Penentuan program-program perangkat daerah merupakan hasil cascading berdasarkan outcome-outcome perangkat daerah dimaksud.

07

Agar dipastikan semua program dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk di dalam Bab VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.





TEMA RKP 2020-2022



TEMA RKPD PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

“REFORMASI STRUKTURAL DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DALAM RANGKA MENYAMBUT IKN”





FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022





DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



MASYARAKAT 01



02

SWASTA

**KEMENTERIAN/
LEMBAGA**

03



04

PEMDA

KONTRIBUSI

TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



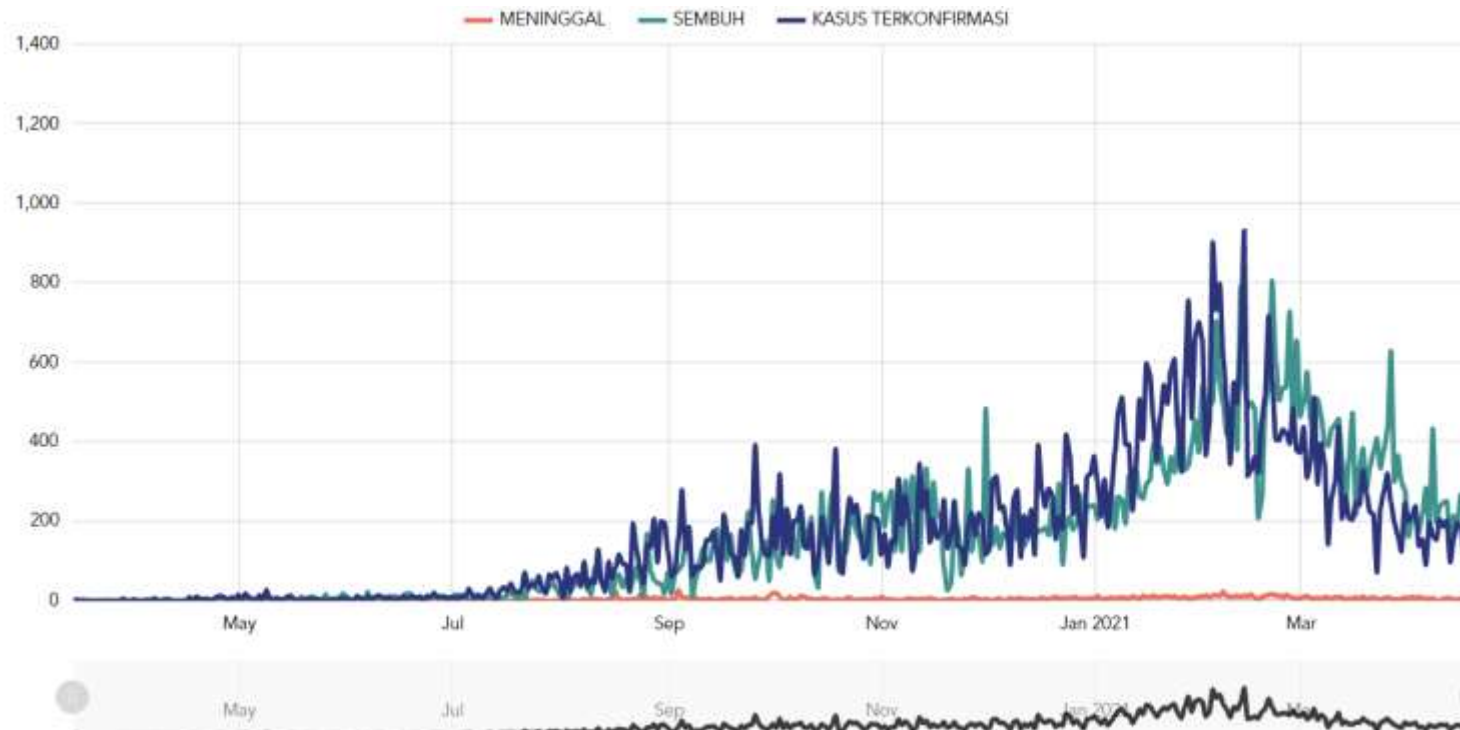
PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (19 April 2021)

**TOTAL KASUS
66,878**

**TOTAL AKTIF
2,028**

**TOTAL SEMBUH
63,313**

**TOTAL
MENINGGAL
1,600**



Perkembangan Kasus harian Provinsi Kalimantan Timur per tanggal 19 April 2021 (+119 Kasus), dengan penambahan kasus tertinggi terjadi pada 12 Februari 2021 (+931 Kasus), dan Penambahan Pasien sembuh tertinggi pada 20 Februari 2021 (+806)



VAKSINASI Covid-19

Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah

Developer	Platform	Binding/Firm Order (juta dosis)	Opsi/Potensi (juta dosis)	ETA Indonesia
Sinovac	Inactivated Virus	125,5		Des 2020 - Jan 2022
			100	Sep 2021 - Mar 2022
AstraZeneca	Viral Vector (Non Replicating)	50	50	Q2 2021 - Q1 2022
Novavax	Protein Subunit	50	80	Jun 2021 - Mar 2022
Pfizer	RNA Based Vaccine	50	50	Q3 2021 - Q1 2022
COVAX/GAVI		54	54	Q2 2021 - Q1 2022
Jumlah		329,5	334	
Total		663,5		
Total kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk		426,8		

Indonesia membutuhkan 15 Bulan untuk *Herd Immunity*

Penambahan jumlah vaksin akan berpengaruh pada percepatan *Herd Immunity*

Aktivitas ekonomi masyarakat dapat dimulai Kembali sebelum *Herd Immunity* pandemi Covid-19 terkendali

Masyarakat tetap bisa melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial dengan menerapkan *Prokes*.

Progress Vaksinasi 2021








LANJUTAN

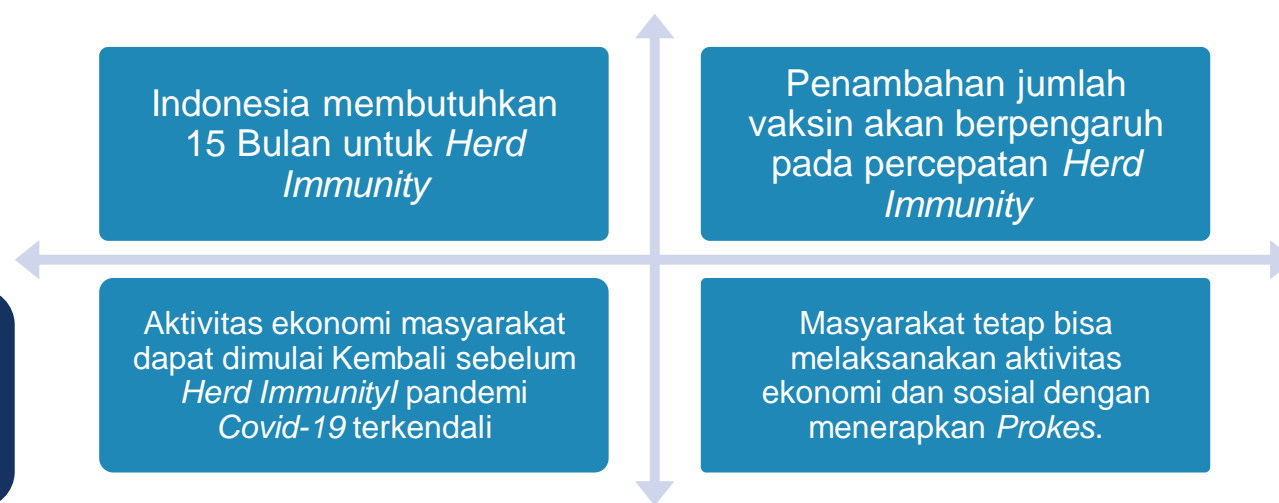
PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

(Per Tanggal 20 April 2021)



- Total sasaran vaksinasi di Indonesia untuk mencapai *herd immunity* adalah sebanyak **181.554.465 orang**. Untuk sasaran **vaksinasi SDM kesehatan** sebanyak 1.468.764 orang, 99,88% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan 90,30% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua.
- Adapun untuk sasaran **vaksinasi petugas publik** adalah sebesar 17.327.169 orang, 42,05% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama 21,54% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Untuk sasaran **vaksinasi lansia** sebanyak 21.553.118 orang, 9,91% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan 3,70% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Sementara untuk total keseluruhannya, dari **3 (tiga) kategori tersebut di atas, 23,23% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan 11,64% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua.**

 SDM KESEHATAN	1.468.764	VAKSIN 1 1.466.955 (99,88%)	VAKSIN 2 1.326.321 (90,30%)
 PETUGAS PUBLIK	17.327.169	VAKSIN 1 7.286.759 (42,05%)	VAKSIN 2 3.732.201 (21,54%)
 LANSIA	21.553.118	VAKSIN 1 2.241.951 (9,91%)	VAKSIN 2 1.005.818 (3,70%)
TOTAL	40.349.051	VAKSIN 1 10.996.334 (27,25%)	VAKSIN 2 6.064.340 (15,03%)





PENGADAAN VAKSIN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



**PERPRES NOMOR 99
TAHUN 2020**



**Pengadaan Vaksin Dan
Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka
Penanggulangan
Pandemi Covid-19**

POIN-POIN PENTING

1. **Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global dan bencana nasional non alam.**
2. **Untuk menanggulangi pandemi Covid-19 diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin sesuai ketersediaan dan kebutuhan ditetapkan Pemerintah.**



DUKUNGAN KEMENDAGRI

Mendagri memberikan dukungan dengan mengoordinasikan Pemda provinsi dan kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 (Pasal 21 Ayat 6).

VAKSIN BERBASIS VIRUS MURNI

- Dikenal dengan istilah *whole virus based* atau *inactivated vaccine*. Virus dimatikan atau dibunuh sehingga tidak berbahaya bagi orang. Kelebihan: telah umum digunakan sehingga sudah bisa diketahui kualitasnya.
- Antigen komplit dan adjuvan atau substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh dapat memicu sistem imun tubuh. Contoh: Vaksin Sinovac, Vaksin Sinopharm

VAKSIN BERBASIS VEKTOR ADENOVIRUS

- Belum ada contoh yang telah dipasarkan atau diedarkan di masyarakat. Karakter dari adenovirus vector vaccine dinilai mampu menstimulasi tubuh sehingga menghasilkan imun yang lebih komplit, lebih kuat dan lebih tahan lama.
- Metode belum dapat dibuktikan sehingga aspek regulasinya akan cenderung lama. Contoh: Vaksin CanSino

VAKSIN YANG BERBASIS GEN ATAU DNA

- Dikenal juga dengan istilah mRNA vaccine. Proses pembuatan vaksin relatif cepat dibandingkan dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya.
- Belum ada yang dipasarkan karena belum dapat dibuktikan dari sisi daya guna dan keamanannya.
- Vaksin berbasis gen baru digunakan kepada binatang, belum untuk manusia.

VAKSIN SUB UNIT ATAU BERBASIS PROTEIN

- Telah dibuktikan khasiatnya karena telah ada contoh-contoh sebelumnya yang beredar di masyarakat.
- Belum ditemukan efek samping dari metode vaksin tersebut.
- Proses pembuatan tergolong cepat.

INDONESIA MEMILIH VAKSIN SINOVAC DAN VAKSIN SINOPHARM

karena metode pembuatan vaksin menggunakan *platform inactivated* atau virus yg dimatikan dan sudah dikuasai Indonesia, serta keterjangkauan harga, efek samping yang rendah, memiliki dosis tunggal, dan memperhatikan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PROGRAM VAKSINASI SEBAGAI UPAYA MITIGASI COVID-19

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi Duta Perubahan Perilaku

Menegakkan Protokol Kesehatan, Sekaligus Mendukung Program Vaksinasi dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19, serta menjadi influencer pendukung vaksinasi dengan membuat konten kampanye yang menyatakan sikap siap divaksin.

- **Satpol PP di daerah terus memonitor** dan melakukan penegakan protokol kesehatan, serta membuat laporan, baik *report* harian, mingguan dan bulanan.
- **Integrasi layanan dasar trantibum linmas** dituangkan pada SPBE dan pembuatan Video Profile Satpol PP.



Program 2021 Kemendagri

DISIPLIN POL PP

- Hak Dan Kewajiban
- Jenis Penyelenggaraan Disiplin
- Sanksi
- Penghargaan Dan Pembinaan
- Pembinaan Dan Pengawasan
- Demosi

Pembentukan kualitas Satpol PP menjadi lebih baik,
menjunjung tinggi kode etik dan mampu bekerja secara konseptual.

TATA KEHIDUPAN POL PP

- Kode Kehormatan
- Tata Krama, Kegiatan Mekanisme Izin dan Dispensasi

Kemendagri senantiasa membangun Komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Penyediaan data lengkap Penerima Vaksin dalam setiap tahapannya dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dalam KTP Elektronik



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



PERKEMBANGAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA



TREN PERBAIKAN EKONOMI



PERKEMBANGAN KONDISI SAAT INI BERPENGARUH PADA TEMA RKP DAN RKPD





GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Jumlah Penduduk

3.769.073 Jiwa



Jumlah KK

1.229.906 kel



Laki-laki

1.955.542 jiwa



Perempuan

1.813.531 jiwa



Batas Wilayah Prov. Kalimantan Tengah

- Sebelah Utara: Kalimantan Utara
- Sebelah Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Barat: Kalimantan Tengah
- Sebelah Selatan: Kalimantan Selatan



7 Kabupaten



3 Kota



<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Sumber: Ditjen Dukcapil I, Maret 2021



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**



Pertumbuhan Ekonomi

-5,46%



Kemiskinan

7,09%



Gini Ratio

0,335



Pengangguran

6,88%



Indeks Pembangunan Manusia

76,24



PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

**PEMBINA UMUM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**SINKRONISASI PEMBANGUNAN
PUSAT DAN DAERAH**

**EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**



**PEMBUAT KEBIJAKAN DAN REGULASI
TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENGAWAS
PEMBANGUNAN DAERAH**





ARAHAN PENYUSUNAN RKPD 2022

MEMPERHATIKAN

Peraturan & Kebijakan

Pemda perlu mensinkronkan peraturan dan kebijakan Pemerintah seperti percepatan penyaluran bansos/JPS dan lainnya



Kondisi & Potensi

Kondisi dan potensi daerah perlu diperhatikan terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi



SIPD

Pemda agar menggunakan SIPD dalam proses penyusunan RKPD



RPJMD

RPJMD perlu diperhatikan karena merupakan pedoman dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan



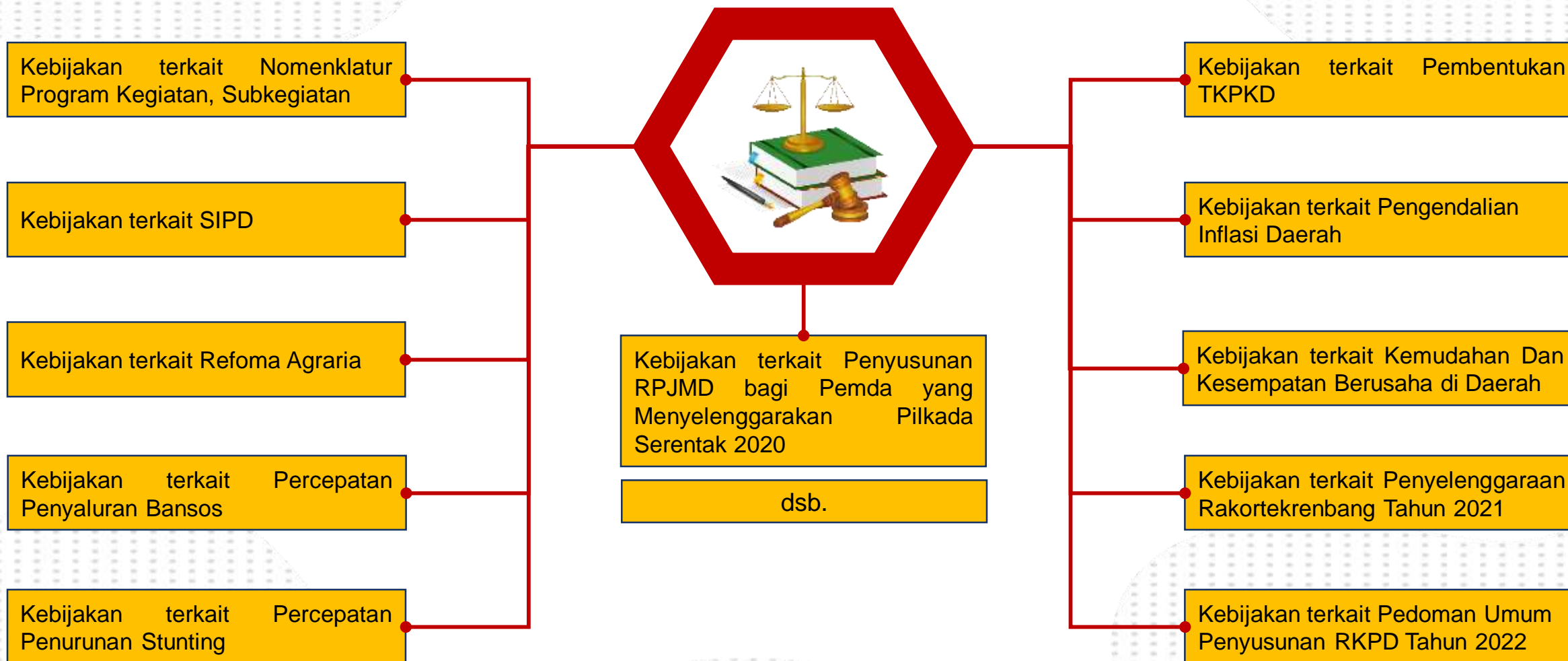
Rakortekrenbang

Hasil Rakortekrenbang agar ditindaklanjuti dan disinkronkan dalam penyempurnaan rancangan RKPD





1. PERATURAN DAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH *(update)*





1.A. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDEKATAN URUSAN PEMERINTAHAN



RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah





- PROGRES PELAKSANAAN & AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
- MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

KAB/KOTA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI

TAHUN
2018

100 KAB/KOTA
INTERVENSI 1000 DESA

TAHUN
2019

160 KAB/KOTA
INTERVENSI 1000 DESA

TAHUN
2020

260 KAB/KOTA
INTERVENSI LOKUS DESA
DITENTUKAN PEMDA

TAHUN
2021

360 KAB/KOTA
INTERVENSI LOKUS DESA
DITENTUKAN PEMDA

TAHUN
2022

514 KAB/KOTA
INTERVENSI LOKUS DESA
DITENTUKAN PEMDA

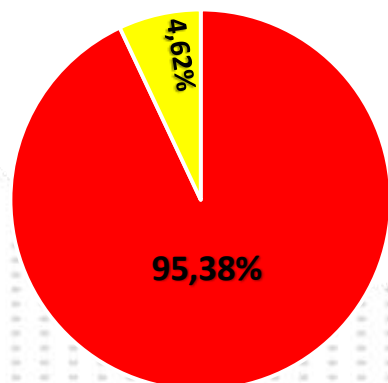
MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2019

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
88,13%	83,75%	81,88%	85,50%	82,50%	78,75%	80,63%	77,50%

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
95,38%	94,62 %	94,62%	93,46%	88,85%	88.46%	89.62%	81.92%

PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN & AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING



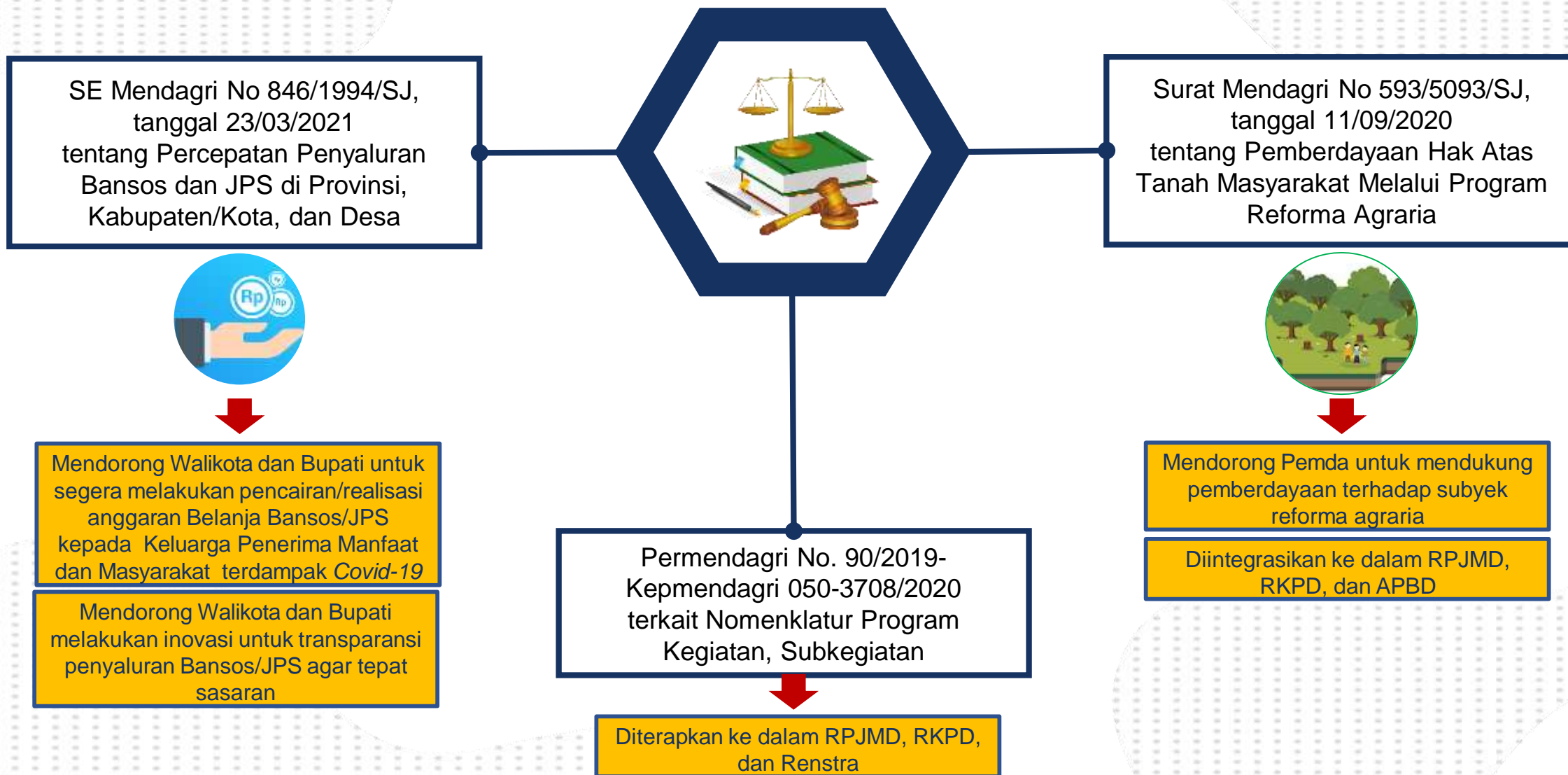
■ Melaksanakan
■ Belum

PADA TAHUN 2019, DARI 160 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI 142 KAB/KOTA (88,13%) TELAH MELAKSANAKAN & (DELAPAN) & AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING. PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI TERDAPAT 248 KAB/KOTA (95,38%) YANG TELAH MELAKSANAKAN & AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING.





1.C. KEBIJAKAN LAINNYA





ISU STRATEGIS RPJMD

- ❑ Peningkatan Daya Saing Manusia (SDM)
- ❑ Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis SDA tidak terbarukan (Vertikal maupun Horizontal)
- ❑ Peningkatan Aksesibilitas dan Penguatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah
- ❑ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kedaulatan pangan dan energi
- ❑ Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
- ❑ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018
- ❑ Pembangunan IKN
- ❑ Kaltim Sehat dan Ketahanan Pangan, Perencanaan Reformasi Sosial dan Pelayanan Publik dengan Tatanan Budaya New Normal

2. RPJMD



VISI RPJMD

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

MISI RPJMD

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

Bidang 1



Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM

Bidang 2



Penguatan Pelaku Dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Bidang 3



Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan

Bidang 4



Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN

Bidang 5



Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik





PREDIKSI MAKRO EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



No	Indikator Kinerja Utama	Target/Realisasi Capaian (RPJMD Murni)				Target Capaian (RPJMD Perubahan)		
		T.2019	R.2019	T.2020	R.2020	T.2021	T.2022	T.2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3	76,61	75,43	76,24	76,75	77,25	77,75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,10	5,94	7,09	6,05	6,00	5,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	6,09	-	6,88	6,81	6,75	6,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,77	3,5±1	-5,46	-1,00	0,00	0,50
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	-	175.65	-	n/a	167.5	170	175
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	5,35	6±1	-1,56	1,5	2	2,5
7	Indeks Gini	0,330	0,330	0,330	0,328	0,313	0,313	0,308
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	78.81	75.85	75.95	75.95	81.61	82.52
9	Nilai Tukar Petani	-	94.63	-	-	101	103	105
10	Indeks Reformasi Birokrasi	-	B (70,50)	-	B (71,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)

Sumber: RPJMD Murni dan Ranwal P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19

REORIENTASI BELANJA MODAL

Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan); Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, *Creative Center*), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

DUKUNGAN PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

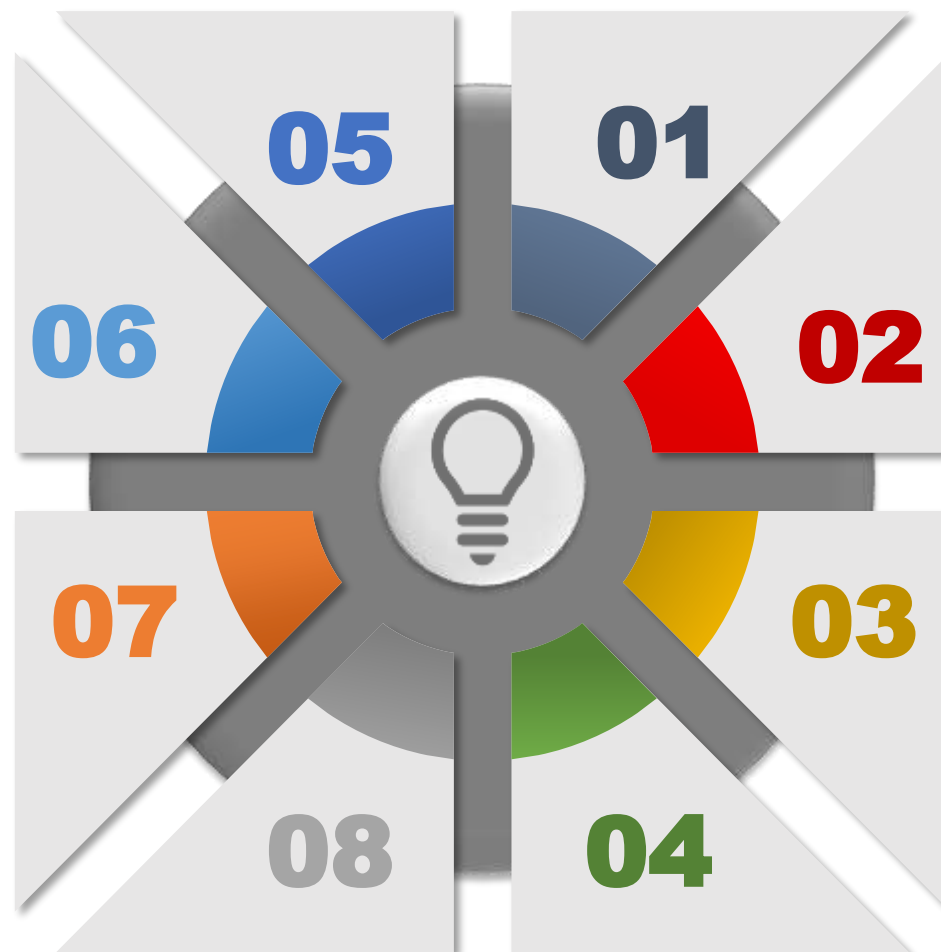
Menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

Percepatan dan perluasan ETPD dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja



SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional

PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Menjaga keberlanjutan fiskal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah

KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antardaerah diharapkan menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah

EVALUASI HIBAH DAN BANSOS

Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan *feedback* yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos





PENYESUAIAN ALOKASI APBD

Diprioritaskan untuk:

Penyesuaian alokasi anggaran, meliputi perubahan alokasi anggaran pada:

- kelompok;
- jenis;
- obyek; dan/atau
- rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1

Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan,

antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *Covid-19*;

2

Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup,

antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

3

Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*,

antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Covid-19*.





SINKRONISASI FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

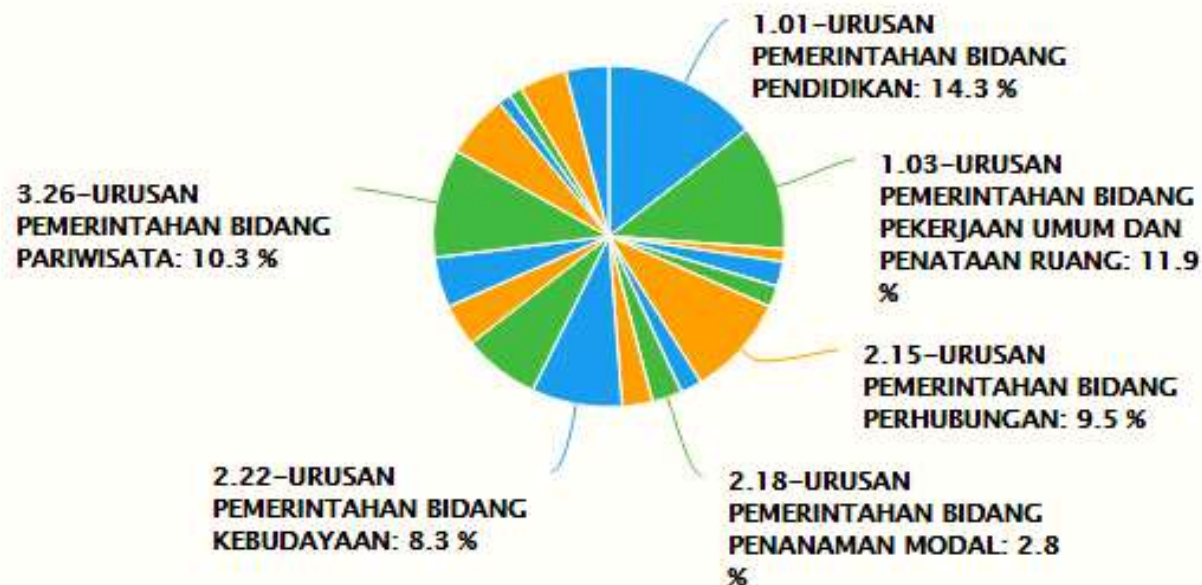


10 FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL

	Pariwisata	-
	Industri	-
	Infrastruktur	✓
	UMKM	✓
	Ketahanan Pangan	-
	Transformasi Digital	-
	Pembangunan Rendah Karbon	-
	Perlindungan Sosial	-
	Kesehatan	-
	Pendidikan dan Ketrampilan	✓

3 dari 10 fokus pembangunan nasional telah dibahas secara intensif di dalam Kortekrenbang 2021 antara Daerah, K/L, Kemendagri dan Bappenas

Intensitas Pembahasan Urusan dalam Rakortek Prov. Kalimantan Timur



Sumber: Hasil Pembahasan Desk dalam Kortekrenbang 2021

Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah menyesuaikan hasil Kortekrenbang dan sekaligus menambahkan fokus Pembangunan Rendah Karbon, Kesehatan, Pariwisata, Industri, Ketahanan Pangan, Transformasi Digital dan Perlindungan Sosial.

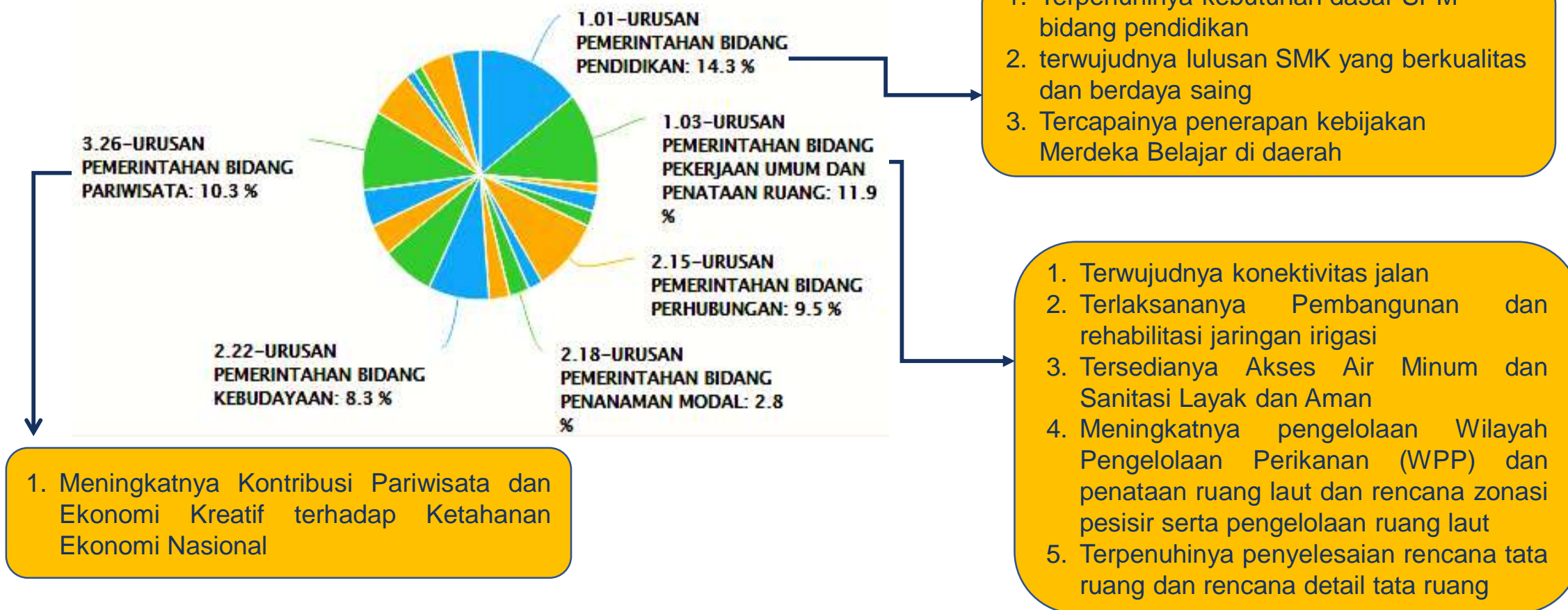




KINERJA URUSAN YANG MENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN PADA KORTEKRENBANG



Intensitas Pembahasan Urusan dalam Kortekrenbang Prov. Kalimantan Timur





HASIL RAKORTEKRENBANG 2021

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



(USULAN KALIMANTAN TIMUR YANG DISETUJUI K/L)



Total Usulan Provinsi Diakomodir: 5 usulan
Total Usulan Provinsi Dibahas lebih lanjut: 22 usulan

Diakomodir

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
2. Bantuan Benih padi hibrida (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Samarinda)
3. PLTS Atap (Kota Samarinda)
4. Bantuan benih jagung (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda)
5. Pelatihan pelatih olahraga prestasi se - Kalimantan Timur (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)

Dibahas lebih lanjut

1. Bantuan untuk Graduasi Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH)
2. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalan Akses Pulau Balang (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
3. Penanganan Banjir Kota Samarinda dan Kota Bontang (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda, Kota Bontang)
4. Penanganan Banjir Kota Balikpapan (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
5. Pembangunan Fly Over Muara Rapak (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
6. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda, Kota Bontang)
7. Pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Usulan Rakorgub) (Kab. Mahakam Ulu)
8. Pembangunan Gedung TPI dan Perluasan PPI Manggar Baru (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
9. Pengembangan Korporasi Desa Sapi di Kalimantan Timur (Usulan Rakorgub) (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara)
10. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu)

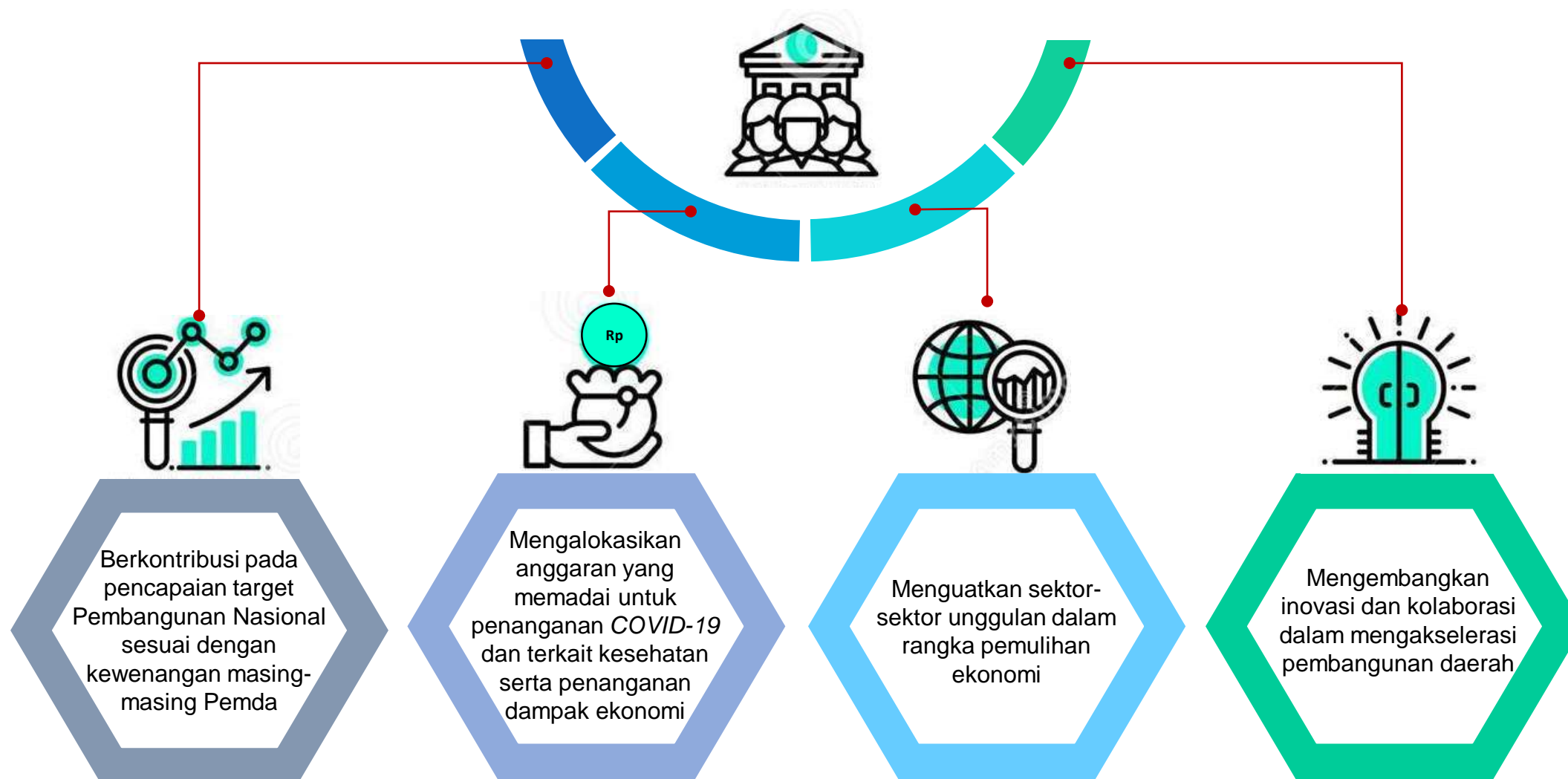
Dibahas lebih lanjut

11. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
12. Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas (Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu)
13. Pelatihan bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kalimantan Timur (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
14. Pengerukan Danau Kaskade Mahakam (Kab. Kutai Barat)
15. Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (Kab. Berau)
16. Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi masyarakat yang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya Kota Balikpapan, Kota Bontang)
17. Penggantian Pipa Transmisi Air Baku IPA Manggar Km.8 (Kota Balikpapan)
18. Pengerukan Alur Sungai Mahakam (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda)
19. Pengembangan Pelabuhan Maloy (Kab. Kutai Timur)
20. Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Kota Balikpapan)
21. Pengerukan kolam labuh/putar dan alur pelayaran PPI Sangata - Kutai Timur dan PPI Tanjung Limau- Bontang (Kab. Kutai Timur, Kota Bontang)
22. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (Kota Balikpapan, Kota Bontang)





RKPD TAHUN 2022 DITUJUKAN UNTUK





TERIMAKASIH



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)